



► PENGENTASAN KEMISKINAN

## Pemkot Andalkan Data Mikro untuk Intervensi

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memperkuat penggunaan data mikro untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan melalui pemanfaatan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta persiapan Sensus Ekonomi 2026.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan pendekatan berbasis data makro tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, intervensi harus berbasis data individu atau *by name by address*.

"Kami ingin semua kebijakan berbasis data mikro. Kemiskinan itu menyangkut orang per orang. Hasil Regsosek yang dilaksanakan Mei hingga Agustus 2026 akan menjadi basis data kuat untuk intervensi program," ujarnya di Kemantren Mantrijeron, Jumat (10/4).

Dia menambahkan, data tersebut akan menjadi landasan program prioritas, seperti beasiswa *Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana*, sehingga penerima manfaat dapat diidentifikasi secara jelas.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY terus mendorong penguatan data dari tingkat bawah melalui program *Kelurahan Cantik (Cinta Statistik)*. Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut saat ini terdapat 25 kelurahan di Kota Jogja yang telah berstatus Kelurahan Cantik, dengan tambahan tiga kelurahan baru tahun ini.

Kelurahan cantik merupakan program pembinaan yang dilakukan oleh BPS di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola data di tingkat kelurahan melalui pendampingan agen statistik. "Jangan sampai *garbage in, garbage out*. Kalau data yang dikumpulkan tidak valid, hasilnya juga tidak berkualitas. Dengan *Kelurahan Cantik*, kami mendorong kebijakan berbasis bukti," katanya.

Selain Regsosek, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi instrumen penting untuk memotret perubahan struktur ekonomi Kota Jogja dalam satu dekade terakhir.

Lurah Suryodiningrat, Subiyana, mengungkapkan jajarannya melakukan verifikasi langsung untuk memastikan data tetap akurat. "Tantangannya, ada masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan informasi. Harapannya, petugas tetap memasukkan data sesuai fakta agar sistem bisa mengkategorikan secara adil," katanya.

(Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005